

BAB I

PENDAHULUAN

I. Alasan Pemilihan Judul

Kemiskinan masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Meskipun kemajuan berjalan pesat, akan tetapi tidak dirasakan oleh setiap orang di dunia. Tingkat kemiskinan sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu negara pun di dunia ini, terutama di negara dunia ketiga yang benar-benar terbebas dari belenggu kemiskinan yang telah menyerang banyak hal. Di beberapa negara sedang berkembang biasanya dimulai dengan masalah di bidang kesehatan dengan rendahnya dan mahalnya pelayanan kesehatan serta masalah di bidang pendidikan dengan rendahnya kualitas dan mahalnya biaya pendidikan. Masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan umumnya kurang kesadaran akan kesehatan dan pendidikan. Padahal kesehatan dan pendidikan merupakan dua hal yang sangat signifikan dalam meningkatkan pembangunan di suatu negara atau wilayah. Jika dua hal utama tersebut tidak berada dalam kondisi yang baik maka pembangunan di suatu negara akan kurang maksimal dalam pelaksanaannya.

Untuk keluar dari permasalahan ini diperlukan peran masyarakat internasional dan lembaga-lembaga dunia untuk mengatasinya. Sebelumnya masalah kemiskinan telah mencapai dimensi internasional dan menjadi agenda internasional, sehingga sekarang ini terdapat pemahaman yang lebih luas dibandingkan pada masa lalu mengenai masalah-masalah kemiskinan yang dihadapi dunia khususnya di negara sedang berkembang

Tulisan ini berjudul “ *Pelaksanaan Program Millennium Development Goals (MDGs) Dalam Upaya Memerangi Kemiskinan di Negara Sedang Berkembang* “. Penulis memfokuskan pada kemiskinan di negara sedang berkembang karena kemiskinan bukan masalah baru yang sampai saat ini belum dapat di atasi dan pada umumnya kemiskinan banyak tersebar di negara-negara yang sedang berkembang. Negara sedang berkembang sendiri memiliki karakter-karakter khusus yang menempatkannya pada posisi kemiskinan, salah satunya adalah tingkat kehidupan yang relatif rendah yang ditandai dengan rendahnya GNP perkapita dari negara itu sendiri

II. Tujuan Penulisan

1. Memberikan gambaran yang obyektif mengenai pelaksanaan *Millennium Development Goals* dalam upaya memerangi kemiskinan di negara sedang berkembang
2. Penulisan ini dimaksudkan sebagai manifestasi dari penerapan teori-teori yang telah didapat penulis selama kuliah
3. Selain itu penulisan ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat kelulusan guna mendapatkan gelar kesarjanaan Strata 1 (S1) di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

III. Latar Belakang Masalah

Saat ini kemiskinan menjadi masalah internasional yang menyita banyak perhatian dan harus dipecahkan bersama. Kemiskinan banyak terjadi di negara-negara dunia ketiga dimana sebagian besar penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Realitas kemiskinan mulai marak dengan ditandai kasus gizi buruk yang banyak terjadi di berbagai negara, semakin meningkatnya laju penyebaran HIV/AIDS, Malaria dan penyakit lainnya seperti *avian influenza* yang telah menyerang beberapa negara di Asia dan Eropa. Di tambah lagi dengan mulai rusaknya lingkungan sekitar yang ditandai dengan banyaknya manusia yang mengkonsumsi air yang kurang sehat dan sedikitnya 100 juta orang masih tinggal di daerah kumuh, serta indikasi lainnya yang menunjukkan kenyataan bahwa kemiskinan telah menyerang seluruh dunia, khususnya di negara sedang berkembang.

Beberapa negara yang baru merdeka mulai bermunculan sejak berakhirnya Perang Dunia II. Negara-negara baru merdeka ini selanjutnya disebut sebagai negara berkembang.¹ Pada dasarnya negara sedang berkembang memiliki beberapa karakteristik yang memposisikannya dalam masalah kemiskinan, diantaranya adalah : *pertama*, sebagian besar penduduk negara sedang berkembang pada umumnya memiliki tingkat kehidupan yang rendah. *Kedua*, tingkat produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah. *Ketiga*, tingkat

¹ Istilah negara sedang berkembang dan negara berkembang dimunculkan oleh Bank Dunia menurut standard yang ditetapkan Bank Dunia untuk mengklasifikasikan suatu negara, yaitu GNP perkapita dalam satu tahun. Menurut Goldthorpe, istilah yang dikemukakan oleh Bank Dunia untuk mengklasifikasikan suatu negara sebagai suatu negara berkembang dapat ditukarkan dengan sebutan dunia ketiga. J. E. Goldthorpe, Sosiologi Dunia Ketiga:

pertumbuhan populasi dan beban tanggungan yang cenderung tinggi. *Keempat*, tingkat pengangguran dan pengangguran semu yang tinggi. *Kelima*, terdapat ketergantungan terhadap produksi pertanian dan produk ekspor. *Keenam*, adanya ketidakadilan dalam pemerataan ekonomi antara negara maju dan negara sedang berkembang yang ditandai dengan dominasi, dependensi dan vulnuralibiti dalam hubungan-hubungan internasional

Fakta kemiskinan global membuktikan bahwa 1 miliar penduduk dunia yang miskin berpendapatan kurang dari US\$ 1/hari dan 2,7 miliar penduduk dunia berpendapatan kurang dari US\$ 2/hari.² Penduduk dengan pendapatan rendah tersebut banyak tersebar di berbagai negara sedang berkembang. Dengan pendapatan penduduk yang sangat minim tersebut dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan akan pangan yang akan sangat ditekan demi mencukupi kebutuhan lainnya. Hal ini dapat kita lihat contohnya dengan adanya kasus gizi buruk yang akhir-akhir ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Kemiskinan di negara-negara berkembang tidak hanya terletak pada rendahnya pendapatan, tetapi juga dalam bentuk-bentuk lain seperti tidak tersedianya kebutuhan dasar sehari-hari, misalnya air bersih yang hanya bisa diperoleh dengan berjalan kaki 5-10 km, sedikitnya 6 juta anak-anak dibawah usia 5 tahun meninggal dunia akibat penyakit malaria, diare, dan radang paru-paru; dan

² <http://www.kompas.com/kompas-cetak/05100/24/opini/2147924.htm>, dalam *Tidak Sekedar*

dalam upaya untuk memerangi kemiskinan global. Beberapa diantaranya adalah *World Summits on Environment and Development* (Rio de Janeiro, 1992) yang bertujuan untuk menciptakan kerjasama global yang adil, dimana lembaga-lembaga internasional dan masyarakat internasional berkomitmen terhadap perjanjian internasional yang menghormati semua kepentingan dan melindungi integritas lingkungan dan sistem pembangunan global. Dalam konferensi ini menghasilkan Agenda 21 dan 5 prinsip utama, yaitu keadilan antar generasi, keadilan dalam satu generasi, pencegahan dini, perlindungan keragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan.

Sekitar 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1994 di Cairo berlangsung *World Summits on Population and Development* yang disepakati oleh 179 negara untuk mematangkan sebuah program aksi populasi dan pembangunan untuk 20 tahun mendatang, dan juga mengesahkan strategi baru yang menekankan pada banyaknya hubungan antara populasi dan pembangunan dimana target-targetnya adalah pendidikan bagi semua, mengurangi kematian bayi dan anak, mengurangi angka kematian ibu, akses terhadap reproduksi dan pelayanan kesehatan termasuk keluarga berencana. Rekomendasi yang dihasilkan mengenai program pelayanan kesehatan dan reproduksi remaja.

Ketika memasuki akhir abad 20 tepatnya pada tahun 1995 dilaksanakan *World Summits on Women* yang merupakan sebuah Konferensi Tingkat Dunia ke IV tentang perempuan yang diselenggarakan di Beijing, Cina dan telah menghasilkan kesepakatan dalam upaya meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya. Keseluruhan

sekitar 114 juta anak-anak tidak menamatkan pendidikan dasar serta kurang lebih 584 juta wanita buta huruf.³

Namun sesungguhnya kemiskinan yang bersifat global ini tidak hanya terdapat di negara yang sedang berkembang saja. Hampir di seluruh belahan dunia tidak luput dari masalah kemiskinan, tidak terkecuali negara-negara industri maju. Meskipun di negara-negara industri maju terdapat kekayaan melimpah, namun demikian, jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan masih tinggi. Kirakira 100 juta orang, termasuk diantaranya 37 juta pengangguran.⁴ Pada 1997, hampir 10 juta orang yang terdiri dari 6,1 juta orang dewasa dan 3,3 juta anak di Amerika Serikat benar-benar dililit kelaparan.⁵

Saat ini kemiskinan menjadi masalah internasional, manakala sebagian besar orang mulai merasakan dampak yang ditimbulkan kemiskinan. Disaat kesejahteraan hidup manusia mulai terusik, barulah mereka sadar bahwa kemiskinan bukanlah masalah sepele yang pantas diabaikan. Kini seluruh dunia mulai memaknai arti kemiskinan dengan menjadikan agenda kemiskinan menjadi agenda utama bangsa-bangsa di dunia. Semua negara yang mempunyai nurani tentu akan mendorong pengentasan kemiskinan menjadi suatu gebrakan besar yang lebih fokus sebagai wahana mengejawantahkan keseriusan kolektif dalam mereduksi jumlah orang miskin.⁶

Keseriusan masalah kemiskinan ini memicu perhatian internasional, khususnya lembaga dunia seperti PBB. Beberapa konferensi telah dilaksanakan

³ United Nation Millennium Project, 2005

⁴ Shukhor Rahman, *New Straits of Malaysia Times*, 2001

⁵ U.S. Department of Agriculture, Food Insecurity Report, 1999.

⁶ <http://www.fao.org/docstore/2005/0105/06/0803.htm>, dalam *Kemiskinan dan*

dalam upaya untuk memerangi kemiskinan global. Beberapa diantaranya adalah *World Summits on Environment and Development* (Rio de Janeiro, 1992) yang bertujuan untuk menciptakan kerjasama global yang adil, dimana lembaga-lembaga internasional dan masyarakat internasional berkomitmen terhadap perjanjian internasional yang menghormati semua kepentingan dan melindungi integritas lingkungan dan sistem pembangunan global. Dalam konferensi ini menghasilkan Agenda 21 dan 5 prinsip utama, yaitu keadilan antar generasi, keadilan dalam satu generasi, pencegahan dini, perlindungan keragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan.

Sekitar 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1994 di Cairo berlangsung *World Summits on Population and Development* yang disepakati oleh 179 negara untuk mematangkan sebuah program aksi populasi dan pembangunan untuk 20 tahun mendatang, dan juga mengesahkan strategi baru yang menekankan pada banyaknya hubungan antara populasi dan pembangunan dimana target-targetnya adalah pendidikan bagi semua, mengurangi kematian bayi dan anak, mengurangi angka kematian ibu, akses terhadap reproduksi dan pelayanan kesehatan termasuk keluarga berencana. Rekomendasi yang dihasilkan mengenai program pelayanan kesehatan dan reproduksi remaja.

Ketika memasuki akhir abad 20 tepatnya pada tahun 1995 dilaksanakan *World Summits on Women* yang merupakan sebuah Konferensi Tingkat Dunia ke IV tentang perempuan yang diselenggarakan di Beijing, Cina dan telah menghasilkan kesepakatan dalam upaya meningkatkan akses dan kontrol kaum

hasil dari konferensi ini tertuang dalam Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi (*Beijing Declaration and Platform for Action*) yang terdiri atas 12 bidang kritis.

Kemudian disusul dengan tiga konferensi lainnya, yaitu *World Summits on Social Development* yang dilaksanakan di Copenhagen, Denmark pada tanggal 6-12 maret 1995 yang mengakui akan pentingnya pembangunan sosial dan manusia bagi semua dengan meletakkan manusia pada pusat pembangunan dan mendorong perkembangan integrasi sosial. Yang mana rekomendasi utamanya adalah memerangi kemiskinan melalui *Poverty Reduction Strategy Papers* (PRSP); dan *World Summits on Human Settlements*, yang dilaksanakan di Istanbul, Turki pada tahun 1996 yang membicarakan dua tema global, yaitu tempat tinggal yang memadai bagi semua, dan dapat menopang pembangunan pemukiman manusia. Dalam konferensi ini melahirkan Agenda Habitat dan lima prioritas kebijakan; serta *World Summits on Youth* yang dilaksanakan di Lisbon, Portugal pada tanggal 8-12 agustus 1998 yang bertujuan untuk menanggapi lebih efektif terhadap ekonomi, sosial, pendidikan, emosional, kebudayaan dan kebutuhan spiritual anak muda dan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Namun Konferensi-konferensi yang telah dilaksanakan ini belum sepenuhnya berhasil, sehingga muncullah suatu inisiatif untuk memerangi masalah kemiskinan didunia yang dipelopori oleh PBB melalui *Millennium Development Goals* (MDGs).

Pada bulan September 2000, PBB menyelenggarakan suatu pertemuan akbar yaitu *Millennium Summit*. Dalam pertemuan ini telah berhasil merumuskan

terdapat butir-butir penting yang telah disepakati oleh 189 kepala negara dan pemerintahan di seluruh dunia. Butir-butir tersebut antara lain adalah solidaritas internasional untuk pembangunan dan pengurangan kemiskinan di seluruh dunia (*Millennium Development Goals*), kepedulian bersama akan isu-isu yang sedang berkembang (perdamaian dan keamanan, lingkungan hidup, hak asasi manusia, tata pemerintahan yang baik, demokrasi, resolusi konflik dan bencana alam), tantangan khusus terhadap kebutuhan Afrika.

Millennium Development Goals adalah komitmen dari komunitas internasional terhadap pengembangan visi mengenai pembangunan; yang secara kuat mempromosikan pembangunan manusia sebagai kunci untuk mencapai pengembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan global.⁷ Selain itu Tujuan Pembangunan Milenium ini merupakan suatu inisiatif global untuk mengurangi jumlah orang-orang miskin di dunia ini menjadi separuhnya pada tahun 2015. *Millennium Development Goals* mempunyai 8 sasaran pembangunan yang harus di capai oleh semua negara yang telah menandatangani kesepakatan tersebut. 8 sasaran pembangunan tersebut adalah :

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan akut
 2. Mencapai pendidikan dasar secara universal
 3. Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
 4. Mengurangi angka kematian anak
 5. Meningkatkan kesehatan ibu
-

6. Memerangi HIV / AIDS, malaria dan penyakit lainnya
7. Menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Nilai-nilai yang mendasari Deklarasi Millennium ini adalah kemerdekaan dari kelaparan, ketakutan dan ketidakadilan; kesetaraan antar bangsa, masyarakat dan gender; solidaritas dalam mengatasi kesenjangan dan ketimpangan; toleransi dalam keanekaragaman menuju perdamaian; penghargaan terhadap alam dan melestarikan lingkungan; pertanggungjawaban bersama baik global maupun nasional.

Melalui *Millennium Development Goals* (MDGs), masyarakat internasional telah sepakat untuk mengurangi kemiskinan dimana banyak negara-negara berkembang yang terperangkap didalamnya. Sumber-sumber pembiayaan luar negeri sebagai sarana akselerasi untuk pelaksanaan pembangunan negara sedang berkembang makin disadari arti pentingnya, baik oleh negara maju maupun oleh negara sedang berkembang. Negara sedang berkembang membutuhkan dorongan yang kuat dalam wujud bantuan luar negeri dan investasi untuk dapat lepas landas dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita nya dan tingkat kehidupan yang lebih baik.

Saat ini *Millennium Development Goals* telah berjalan selama lima tahun. Tentu saja jalan menuju apa yang hendak dicapai ini tidaklah mudah, membutuhkan waktu dan upaya-upaya yang relevan dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu, pencapaian MDGs menuntut komitmen tinggi pihak

tingkat untuk secara konsisten dan konsekuen dalam hal memerangi kemiskinan demi kehidupan yang lebih baik dimasa sekarang maupun yang akan datang bagi seluruh dunia pada umumnya dan negara-negara sedang berkembang pada khususnya, dimana saat ini tengah terjebak dalam perangkap kemiskinan.

Sebenarnya sebelum MDGs dilaksanakan telah terdapat upaya dari lembaga-lembaga ataupun organisasi dunia dalam rangka memerangi kemiskinan di negara sedang berkembang, walaupun di negara industri maju juga tidak lepas dari masalah kemiskinan global ini. Beberapa lembaga tersebut adalah IMF, IBRD, WTO, CGI dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kenyataannya lembaga-lembaga ini malah semakin memiskinkan orang miskin dan bukan berupaya untuk memberdayakan orang miskin. Sebagai contohnya adalah IMF yang kehadirannya justru menciptakan kemacetan ekonomi, bukan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagian orang yang ragu akan MDGs meyakini bahwa program ini tidak akan berhasil. Dan menurutnya dengan dilaksanakan program ini seakan dunia tidak ada jeranya menerima program-program pembangunan yang tidak jauh berbeda dengan program-program sebelumnya.

Melihat kemiskinan yang menjadi masalah internasional ini, dimana selain tersebar di banyak negara sedang berkembang, kemiskinan juga banyak terdapat di negara industri maju. Negara adidaya seperti Amerika Serikat pun belum dapat menghindarinya. MDGs sebagai program dunia untuk mereduksi kemiskinan global ini pun seharusnya ditetapkan sebagai program pembangunan bagi seluruh negara-negara didunia yang menyenakatinya, baik itu negara industri

IV. Rumusan masalah

Dengan melihat pada latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik suatu rumusan permasalahan, yaitu :

“Mengapa *Millennium Development Goals* ditetapkan sebagai program pembangunan baru untuk negara sedang berkembang?”

V. Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam karya tulis ini penulis akan menggunakan kerangka pemikiran sebagai acuan yang diharapkan dapat memberi gambaran tentang fenomena yang akan penulis teliti. Teori yang akan penulis gunakan adalah Teori Ketergantungan Baru untuk menjawab masalah yang sedang penulis angkat.

Teori Ketergantungan Baru

Pada dasarnya pola hubungan antara aktor satu dengan lainnya bersifat saling ketergantungan (*interdependency*) dan tergantung (*dependency*). Pada pola hubungan yang saling ketergantungan akan menimbulkan sifat yang saling menguntungkan antar aktor hubungan internasional. Sedangkan pada pola hubungan yang ketergantungan, dalam hubungannya akan menimbulkan eksploitasi dari yang kuat atas yang lemah. Teori ketergantungan memandang kemunduran disebabkan oleh faktor eksternal, serta melihat hubungan antar aktor atau negara dari perspektif negara yang lemah.

Teori ketergantungan bermula dari perdebatan-perdebatan tentang masalah keterbelakangan yang berkembang di Amerika Latin pada awal 1950-an. Inti dari

timbulnya distorsi besar-besaran dalam struktur ekonomi “pinggiran“ (*Periphery*), yang pada gilirannya menimbulkan konflik sosial yang gawat dan akhirnya mendorong timbulnya penindasan negara terhadap rakyat di masyarakat yang tergantung itu.⁸

Hampir semua negara sedang berkembang mengalami penetrasi dan menjadi amat tergantung pada negara maju. Penetrasi tersebut dapat terjadi melalui berbagai cara, baik ekonomi, politik, maupun kultural. Pada dasarnya negara-negara yang sedang berkembang merupakan sasaran yang tepat bagi negara maju untuk melancarkan ekspansinya, yang pada akhirnya membuat negara sedang berkembang menanggung sebuah konsekuensi besar atas pola hubungan yang tergantung ini dengan sebuah keadaan yang terbelakang. Seorang ilmuwan sosial Brazil yang bernama Dos Santos membenarkan bahwa :

*“By dependence we mean a situation in which the economy of certain countries is conditioned by the development and expansion of another economy to which the former is subjected. The relation of interdependence between two or more economies, and between these and world trade, assumes the form of dependence when some countries (the dominant ones) can expand and can be self-sustaining, while other countries (the dependent ones) can do this only as reflection of that expansion, which can have either a positive or a negative effect on their immediate development”.*⁹

Bagi sebagian ilmuwan dalam teori ketergantungan lama, yang menganalisa adanya ketergantungan dalam pembangunan seringkali berfokus

⁸ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 204

⁹ Dengan ketergantungan kita mengartikan sebuah situasi dimana ekonomi negara-negara tertentu terkondisikan oleh perkembangan dan ekspansi ekonomi lain yang menjadi tempat bergantung negara-negara tadi. Hubungan saling ketergantungan antara dua atau lebih ekonomi, dan antara ekonomi-ekonomi ini dengan perdagangan dunia, mengambil bentuk ketergantungan sementara beberapa negara (yang dominan) dapat melakukannya hanya sebagai pencerminan ekspansi, yang bisa memiliki pengaruh positif ataupun negatif bagi perkembangan langsung mereka. T. Dos

pada faktor eksternal yang di tengarai sebagai faktor penyebab dari ketergantungan tersebut. Yang artinya ketergantungan ini terkait dengan masalah penetrasi asing kedalam ekonomi politik negara sedang berkembang.

Setelah Perang Dunia Kedua muncul teori ketergantungan baru yang diperluas dalam tulisan Dos Santos, atau yang lebih dikenal dengan ketergantungan industri-teknologi. Ketergantungan baru merupakan fenomena terakhir, didasarkan pada perusahaan-perusahaan multinasional, yang setelah perang dunia kedua berinvestasi dalam industri-industri yang digerakkan oleh pasar internal negara-negara terbelakang.¹⁰ Menurut Dos Santos pembangunan industri bergantung pada ekspor di sektor ekonomi tradisional yang pada akhirnya terikat dengan modal asing. Pembangunan industri juga terkondisikan oleh monopoli teknologi dari pusat-pusat imperialis.¹¹

Teori ketergantungan baru mencoba menunjukkan bahwa hubungan negara-negara dependen dengan negara-negara dominan tidak dapat diubah tanpa adanya perubahan dalam struktur internal dan hubungan-hubungan eksternalnya.¹² Dapat di pahami bahwa teori ketergantungan baru terkait dengan faktor internal dari negara yang lemah itu sendiri yang menyebabkan pola ketergantungan itu terjadi. Berbeda dengan teori ketergantungan lama yang mengaitkan faktor eksternal sebagai penyebab ketergantungan serta hubungan ketergantungan sifatnya langsung antara negara yang kuat dan negara yang lemah. Sedangkan dalam ketergantungan baru hubungan ketergantungan sifatnya tidak langsung

¹⁰ Donald H. Claitor, *Teori Ketergantungan Politik Pembangunan Beradanya*, PT Binacraft

antar negara, melainkan antar negara tersebut dihubungkan oleh instrumen tertentu seperti investasi Perusahaan Multinasional, lembaga-lembaga keuangan dunia, dan lain sebagainya.

Bagi negara sedang berkembang, pada umumnya ketergantungan terhadap negara maju relatif besar. Teori ketergantungan baru dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh negara-negara maju terhadap negara sedang berkembang melalui sebuah program yang di usung Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengurangi jumlah orang miskin di dunia menjadi separuhnya pada tahun 2015 yang biasa di kenal dengan *Millennium Development Goals*, dimana salah satu tujuan yang menjadi targetnya adalah mengenai kemitraan global dan pembangunan yang meliputi pengembangan lebih jauh atas perdagangan terbuka yang melibatkan perusahaan-perusahaan Multinasional, penanganan terhadap kebutuhan khusus negara-negara berkembang dan kerjasama dengan pihak swasta dengan membangun penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru. Dapat dikatakan bahwa akhir-akhir ini pendekatan kemitraan sangat mempengaruhi wacana PBB. Kemitraan yang dimaksud adalah antara PBB, pemerintah, kelompok bisnis dengan dukungan pendanaan yang kuat.

Berbagai *agreement* internasional yang di tetapkan, termasuk MDGs dibuat untuk memuluskan investasi asing masuk di negara sedang berkembang. Negara sedang berkembang menyepakati *Millennium Development Goals* yang artinya negara tersebut sepakat untuk memerangi kemiskinan dengan melaksanakan pembangunan, salah satunya dengan menekankan kemitraan global

hal ini dapat dikatakan bahwa sektor swasta sangat dibutuhkan. Karena bantuan luar negeri dan penanaman modal asing, terutama bagi negara sedang berkembang umumnya dipandang sebagai faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi, dengan alasan bahwa kemampuan untuk menginvestasi modal dalam berbagai proyek pembangunan yang berasal dari sumber-sumber dalam negeri tidak cukup tersedia. Oleh karena itu mendatangkan bantuan luar negeri dan penanaman modal asing yang melibatkan perusahaan multinasional dipandang sebagai suatu solusi.

Dari penjelasan diatas dapat menjelaskan ketergantungan yang cukup besar yang dialami negara sedang berkembang terhadap investasi dan bantuan luar negeri dari negara pendonor, dalam hal ini negara maju.

VI. Hipotesa

Dari latar belakang masalah dan kerangka dasar teori diatas maka hipotesa yang penulis kemukakan adalah *Millennium Development Goals* ditetapkan sebagai program pembangunan baru di negara sedang berkembang, karena sebenarnya *Millennium Development Goals* ditetapkan untuk menciptakan ketergantungan baru di negara-negara yang sedang berkembang pada negara maju dan untuk memuluskan masuknya Perusahaan Multinasional ke negara sedang berkembang.

VII. Jangkauan Penelitian

Agar tidak terjadi pembahasan yang meluas, maka perlu ditetapkan

.....

sejak diselenggarakannya *Millennium Development Goals* yaitu tahun 2000 sampai tahun 2005. akan tetapi juga tidak dikesampingkan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa sebelumnya yang relevan dengan penulisan ini.

VIII. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun karya tulis ini, penulis menggunakan studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan (*Library Research*). Oleh karena itu, data yang akan di olah adalah data sekunder yang meliputi data-data yang bersumber dari buku-buku, literatur-literatur, surat kabar, majalah, jurnal-jurnal serta literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan penulisan skripsi ini.

Penulisan ini dilakukan dengan metode deduktif yang berdasarkan pada kerangka dasar teori, kemudian ditarik suatu hipotesis yang digunakan melalui data empiris. Diharapkan dengan proses tersebut, penelitian ini dapat memperoleh data-data yang cukup untuk mencapai tujuan penelitian.

IX. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penyusunan karya tulis ini, maka penulis berusaha untuk menuangkannya secara sistematis dari bab ke bab, yakni bab I sampai bab V. Berikut ini adalah uraian singkat yang termuat dari bab ke bab itu :

Bab I. Bab ini merupakan Pendahuluan yang meliputi; Alasan Pemilihan Judul,

Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan.

Bab II. Bab ini menjelaskan mengenai masalah kemiskinan sebagai masalah internasional yang meliputi faktor-faktor penyebab kemiskinan dan kemiskinan yang terdapat di negara sedang berkembang. Selain itu juga menjelaskan usaha-usaha dunia dalam memerangi kemiskinan yang berupa pelaksanaan enam Konferensi Tingkat Tinggi PBB, serta semakin melemahnya peran negara dalam pelaksanaan pembangunan di negara sedang berkembang.

Bab III. Bab ini menjelaskan mengenai munculnya *Millennium Development Goals* sebagai upaya memerangi kemiskinan di negara sedang berkembang, dimulai dari latar belakang terbentuknya *Millennium Development Goals*, delapan tujuan MDGs, Strategi *United Nations Development Programs* (UNDP) untuk mencapai MDGs, Konferensi Tingkat Tinggi PBB yang memperkuat MDGs untuk mencapai targetnya serta lobi-lobi *Multinational Corporation* di MDGs melalui Kamufase hijau yang dilancarkan pada konferensi yang melatarbelakangi MDGs.

Bab IV. Bab ini menjelaskan mengenai implikasi delapan Tujuan Pembangunan Milenium dengan *Multinational Corporation* yang meliputi pencapaian delapan tujuan MDGs pada tahun 2000-2005 serta keberadaan MNC di balik delapan tujuan MDGs yang bertujuan untuk menciptakan ketergantungan baru di negara sedang berkembang.